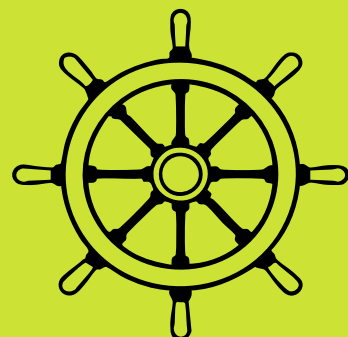
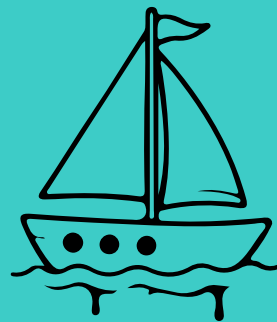




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

RENCANA KERJA 2026

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen **Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026** ini dapat disusun dengan baik sebagai bagian dari upaya perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dan memuat arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. RKT ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan dokumen penganggaran, serta sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi.

Penyusunan RKT ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami menyadari bahwa pencapaian sasaran dalam dokumen ini memerlukan sinergi dan komitmen dari seluruh jajaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Kerja Tahunan ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di tahun yang akan datang.

Trenggalek, 14 Januari 2026
Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Iman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Visi Misi	3
1.3. Tujuan	4
1.4. Dasar Hukum	4
1.5. Sasaran Program	5
BAB II. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	7
2.1. Target Kinerja.....	7
2.2. Kerangka Pendanaan.....	8
2.3. Rencana Pencapaian Target Kinerja.....	8
BAB III. PENUTUP	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2026	7
Tabel 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2026	8

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan subsektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, serta mendukung pencapaian delapan Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dengan fokus pada misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.

Pencapaian Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah keniscayaan apabila menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai episentrum pembangunan nasional, mengingat potensi sumber daya perairan yang sangat besar. Orientasi pembangunan sudah semestinya beralih ke sektor kelautan dan perikanan dengan menjadikan sektor ini sebagai poros penggerak pembangunan dan perekonomian nasional, transformasi pendekatan pembangunan yang sebelumnya hanya berorientasi pada peningkatan produksi menjadi pendekatan pembangunan secara terukur dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta berorientasi pada 1 permintaan pasar yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Transformasi pendekatan diimplementasikan ke dalam lima arah kebijakan pembangunan Ekonomi Biru yaitu:

- 1) Memperluas kawasan konservasi laut;
- 2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
- 3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
- 4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan bersifat indikatif. RPJMN 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Visi Presiden 2026-2029 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas”. Visi ini menegaskan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Sebagai Kementerian yang membantu Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

KKP berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan melalui tiga tujuan utama pembangunan (*ultimate goals*) yaitu: 1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan dalam rangka penyediaan pangan biru (*blue food*), pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta tiga tujuan utama pembangunan (*ultimate goals*), Visi KKP tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Strategis KKP 2025- 2029. Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit utama yang mengampu program pembangunan perikanan dan setiap satuan

kerja yang mengampu kegiatan pembangunan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Selanjutnya berpedoman pada Rencana Aksi Program DJPT PPN Prigi menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh unit utama, dan akan dilaksanakan oleh PPN Prigi melalui kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2026.

1.2. Visi Misi

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut : “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan kedalam misi, strategi, dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan sebagai berikut:

- Menjaga Keberlanjutan dan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan;
- Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

- Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan serta kualitas hidup pelaku utama kelautan dan perikanan;

- Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektifitas dan berkualitas.

1.3. Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 PPN Prigi adalah sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program/ kegiatan tahun 2026 mulai dari penetapan kinerja, penganggaran, dan evaluasi program/ kegiatan.

1.4. Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37)
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1687).

1.5. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pembangunan perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebagai suatu *outcome/ impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan, antara lain:

1. **Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan**” dengan Indikator Kinerja: Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
2. **Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Meningkat**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan**”, dengan Indikator Kinerja: Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
3. **Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan**”, dengan Indikator Kinerja: Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Nusantara Prigi; Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Pelayanan

- Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; dan Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
4. **Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan”** dengan Indikator Kinerja: Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan; dan Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan;
 5. **Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap”** dengan Indikator Kinerja: Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja; Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

BAB II. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

2.1. Target Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukup pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (*output*). Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan berupa sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan serta *cascading* dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Tabel 1. Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1 Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.601,27
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meningkat	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	11.399,78
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggungjawab	3 Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84,2
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	40,5
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	33
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	584
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	75,5
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	86
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88,2
		13 Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	84,5
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	77

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	82
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	92,1
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	71,75
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	88,8

2.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target setiap sasaran strategis, PPN Prigi telah merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran yang tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2026, kegiatan PPN Prigi terbagi dalam dua *output* kegiatan utama, yaitu:

Tabel 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2026

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT	PAGU / TARGET (Rp)
1	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	725.338.000
		BGA.002 Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	725.338.000
2	2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.144.017.000
		2342.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.500.000
		2342.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.872.197.000
		2342.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	264.320.000
Total Anggaran			12.869.355.000

2.3. Rencana Pencapaian Target Kinerja

1. Sasaran Kegiatan (SK-1): Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dengan Indikator Kinerja Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Indikator Nilai PNBP merupakan penerimaan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan dengan tarif sebagaimana telah ditetapkan oleh PP 85 Tahun 2021 tentang Tarif atas PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Realisasi Nilai PNBP PPN Prigi diukur dan dilaporkan berkala secara triwulan. Target 2026 sebesar Rp 1.601,27 Juta;

2. Sasaran Kinerja (SK–2): Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Meningkat, dengan Indikator Kinerja Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Indikator ini merupakan jumlah produksi perikanan tangkap yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dengan pelaporan bersifat triwulan dan penghitungan bersifat nilai posisi akhir. Target 2026 sebesar 11.399,78 Ton;
3. Sasaran Kegiatan (SK–3) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab, dengan Indikator Kinerja:
 - Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
Indikator kinerja ini dilakukan berdasarkan 2 (dua) indikator penilaian, yaitu
1) Hasil analisa kesesuaian permohonan pengusahaan terhadap usulan pengusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan /atau dievaluasi dibandingkan dengan total jumlah usulan pengusahaan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi x 80%; 2) Ruang lingkup pelayanan pengusahaan yang terstandardisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20%. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dengan target 2026 sebesar 100%.
 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
Indikator kinerja ini merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan) sebagai acuan bagi satuan kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam melaksanakan penilaian evaluasi kinerja pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau dioperasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau pemerintah daerah. Adapun parameter yang digunakan dalam penilaian pada Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau dioperasikan oleh Kementerian yang sudah menjadi UPT yaitu penilaian kinerja operasional, penilaian kinerja organisasi, dan penilaian kinerja pegawai. Pengukuran capaian bersifat triwulan dengan target tahun 2026 sebesar 84,2.

- Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
Indikator kinerja ini menunjukkan 1) Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%); 2) Jumlah Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%); 3) Jumlah Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). Pengukuran bersifat tahunan dengan target 40,5%.
 - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan pengembangan fasilitas eksisting (ha) dibandingkan dengan luas pelabuhan perikanan sesuai dengan master plan (ha) x 100%. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, dengan target tahun 2026 sebesar 70%.
 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
Penilaian Indikator Kinerja ini berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). Penghitungan bersifat triwulan dengan target 33.
4. Sasaran Kegiatan (SK-4) Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, dengan Indikator Kinerja:
- Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan
Indikator kinerja ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (Sertifikat Kelaikan Kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Penghitungan capaian bersifat triwulan dengan nilai posisi akhir. Target tahun 2026 sebesar 584 kapal;
 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan
Indikator kinerja ini merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.

Penghitungan capaian bersifat semester dengan pola perhitungan rata-rata. Target tahun 2026 sebesar 0,28.

5. Sasaran Kegiatan (SK-5) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, dengan indikator kinerja :

- Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
Indikator kinerja ini merupakan indikator nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil Serta mengacu kepa Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Data Dukung berupa lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan di unit kerja. Target indikator kinerja ini sebesar 75,5.
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
Indikator kinerja ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat bulanan dengan target 86%.
- Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
Indikator kinerja ini adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi. Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dengan target 88,2.
- Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan

kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Pengukuran indikator kinerja ini bersifat semester dengan target 84,5.

- Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang dimumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan Pagu pengadaan unit kerja mandiri. Ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dengan target tahun 2026 sebesar 77.

- Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator kinerja ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dengan target tahun 2026 sebesar 82.

- Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat semester dengan target tahun 2026 sebesar 92,1.

- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan suatu nilai capaian dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data capaian diperoleh dari aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang berupa Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. Target tahun 2026 sebesar 71,75.

- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Survei Kepuasan Masyarakat SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dengan target tahun 2026 sebesar 88,8.

Matriks Strategi Pencapaian Kinerja dan Rencana Aksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

BAB III. PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis untuk meningkatkan PPN Prigi yang terstandar. Rencana Kerja Tahunan ini memuat semua program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat rutin.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan ini PPN Prigi akan lebih mudah dalam melaksanakan pengelolaan program/kegiatan, implementasi, monitoring dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur sehingga memudahkan dalam melaksanakan seluruh kegiatan di PPN Prigi dengan baik dan terencana.

Demikian Rencana Kerja Tahunan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MATRIKS STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

NO	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR	KEGIATAN
1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	Peningkatan kepatuhan <i>stakeholder</i>	Monitoring dan evaluasi pengguna jasa.
		Verifikasi perhitungan PNBP	Rekonsiliasi PNBP
2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	Melaksanakan pendataan produksi perikanan tangkap	Penyusunan jadwal piket enumerator
			Melaksanakan kegiatan pengumpulan data / pendataan produksi perikanan tangkap
		Tersedianya data produksi perikanan tangkap yang akurat/valid	Melaksanakan pengolahan data perikanan tangkap
			Melaksanakan verifikasi dan validasi data statistik perikanan tangkap
			Koordinasi dengan pusat dan daerah terkait kegiatan validasi data
3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	Peningkatan kepatuhan <i>stakeholder</i>	Melaksanakan validasi data statistik semester dan tahun.
			Melaksanakan kegiatan pelayanan pengusahaan dan monev pengguna jasa lahan dan bangunan.
4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	Melaksanakan entry data tepat waktu	Menyusun jadwal pelaksanaan <i>entry</i> data pada aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan
			Melakukan verifikasi dan validasi data yang diinput pada aplikasi PIPP secara berkala (bulanan)
		Melaksanakan koordinasi dengan seluruh tim kerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Menyusun SK Tim Pengelolaan PIPP PPN Prigi
			Melaksanakan rapat koordinasi Tim Pengelola PIPP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait entry data PIPP	Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Entry Data PIPP secara berkala (bulanan)
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	Meningkatnya jumlah kapal yang lengkap dokumen kapal dan dokumen perizinannya	Melaksanakan fasilitas penerbitan dokumen kapal bekerjasama dengan KSOP dan dokumen prijinan kapal izin daerah bekerjasama dengan DKP Provinsi Jawa Timur
		Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan nelayan terkait kegiatan kesyahbandaran	Melaksanakan kegiatan sosialisasi kesyahbandaran

NO	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR	KEGIATAN
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	Menyusun perencanaan dan melaksanakan pemeliharaan/pembangunan dan melaksanakan movev	Melaksanakan identifikasi kebutuhan fasilitas pelabuhan, melaksanakan kegiatan pemeliharaan/pembangunan, dan melaksanakan movev
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi SELARASKAN (bulanan)
		Peningkatan sarana prasarana kebersihan pelabuhan	Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana K5
8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	Peningkatan kesadaran pemilik kapal agar kapalnya selalu memenuhi aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan	Sosiliasi kepada pemilik kapal/nakhoda terkait aspek laik laut, laik tangkap, laik simpan
		Terlayannya semua kapal yang memohonkan penerbitan sertifikat kapal perikanan di PPN Prigi dan UPTD Binaan	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kelaikan kapal dan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	Meningkatnya jumlah kapal yang lengkap dokumen kapal dan dokumen perijinannya	Melaksanakan fasilitas penerbitan dokumen kapal bekerjasama dengan KSOP dan dokumen prijinan kapal izin daerah bekerjasama dengan DKP Provinsi Jawa Timur
		Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pemilik kapal tentang kelengkapan dokumen kapal	Melakukan verifikasi kapal yang berpotensi tetapi belum memenuhi ketentuan.
			Sosialisasi kepada pelaku usaha / pemilik kapal tentang kelengkapan dokumen kapal perikanan.
10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	Membentuk tim kerja pembangunan ZI	Menyusun Surat Tugas Tim Pembangunan ZI PPN Prigi
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI PPN Prigi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI PPN Prigi (semester)
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	Menindaklanjuti temuan dan/atau saran pada Laporan Hasil Pengawasan dilaksanakan tepat waktu	Melaksanakan koordinasi secara terus menerus terhadap Inspektorat Jenderal KKP dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan.
12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	Meningkatkan pengelolaan SAKIP	Melaksanakan pengelolaan SAKIP dan melengkapi dokumen SAKIP sesuai ketentuan
			Memanfaatkan secara optimal hasil movev untuk umpan balik perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan program

NO	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR	KEGIATAN
13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	Menyusun kebutuhan pelatihan pegawai	Menyusun program <i>Human Capital Development Plan</i> (HCDP)
		Menghimpun informasi terkait pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi/ pelatihan	Melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi/ pelatihan
		Melakukan evaluasi capaian IP ASN secara berkala	Menyusun Laporan Evaluasi Capaian IP ASN secara berkala
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	Memaksimalkan persentase RUP PBJ yang diumumkan pada SiRUP	Melaksanakan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan kedalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan.
			Revisi RUP pada SiRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun,
15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	Meningkatkan kepatuhan pengelolaan BMN	Berkoordinasi secara intensif dalam pengelolaan BMN
			Optimalisasi pemanfaatan aset
			Mengusulkan penghapusan BMN yang sudah rusak
16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	Melaksanakan revisi halaman III DIPA tepat waktu per triwulan	Menginput dan mengajukan revisi ke Kanwil tiap triwulan
		Menyusun RPD per jenis belanja sesuai target per triwulan	Melakukan perhitungan dan menginput RPD kedalam aplikasi SAKTI
		Akselerasi kegiatan dan realisasi anggaran sesuai target RPD	Melaksanakan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan ROK
		Tidak terlambat pendaftaran kontraktual belanja modal nilai diatas Rp 200 juta	Pendaftaran kontraktual ke KPPN tepat waktu
		Penyelesaian GUP dan PTUP tepat waktu	Pengajuan GUP dan PTUP tepat waktu
		Menghindari terjadinya retur pembayaran	Melakukan verifikasi pada saat pendaftaran data suplier
		Melakukan pengisian capaian output tepat waktu dan sesuai target	Menginput capaian output maksimal lima hari kerja pada bulan berikutnya
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	Mengidentifikasi variable efektivitas dan efisiensi kinerja perencanaan anggaran.	Mengidentifikasi rincian output (RO) level satuan kerja
			Mengidentifikasi indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran sesuai PMK Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR	KEGIATAN
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	Meningkatkannya nilai survey kepuasan masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik
			Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik
			Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi terkait pelayanan publik

Mengetahui,
Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Iman S.St.Pi, M.Pi.

TAHUN 2026[illegible]

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												
								Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (persen)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	2338.BGA.002. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	389,093,000.00															
				054.E.Indentifikasi Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan	20,556,000.00	1	Kegiatan											1		
	7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	2338.BGA.002. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	389,093,000.00															
				055.A.K5 di Pelabuhan Perikanan	25,520,000.00	1	Kegiatan											1		
				2338.BGA.002. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	389,093,000.00															
				055.C.FGD Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat (PBUS)	37,275,000.00	1	Kegiatan						1							
	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	Tim Kerja Kesyahbandaran																	
	9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	Tim Kerja Kesyahbandaran	2338.BGA.002. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	389,093,000.00															
				051.B. Desiminasi Regulasi tentang Kesyahbandaran di PP	4,165,000.00	1	Kegiatan								1					
	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	TIDAK ADA DUKUNGAN ANGGARAN															
						1	Kegiatan												1	
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	TIDAK ADA DUKUNGAN ANGGARAN															
					1	Kegiatan												1		
12		Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	TIDAK ADA DUKUNGAN ANGGARAN																
					1	Kegiatan												1		
	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi		2342.EBA.994.Layanan Perkantoran	11,872,197,000																
			ERA.994.001.Gaji dan Tunjangan	9,494,524,000.00	1	Layanan													1	
	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2338.BGA.002. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	389,093,000.00																
			054. G. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang mendukung PNB	43,360,000	1	Unit													1	
			2338.BGA.002. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	389,093,000																
			051.E. 522191.Belanja Jasa Lainnya	154,974,000	1	Paket													1	
			2342.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	7,500,000																
			051.Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	7,500,000	1	Paket														
			2342.EBA.994.Layanan Perkantoran	11,872,197,000																
			2342.994.002.522191. Belanja Jasa Lainnya	1,299,909,000	1	Paket													1	
				2342.EBA.994.Layanan Perkantoran	11,872,197,000															

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala													
							Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des		
	15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2342.994.002.I.PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	26603000	1	Paket												1	
				EBB.971.Layanan Prasarana Internal	140,000,000															
				EBB.971.051.Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran	140,000,000					1										
				2338.BGA.002. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	389,093,000															
				054.F.Kegiatan terkait objek vital nasional (obvitnas) di pelabuhan perikanan	8,800,000															
				2342.EBA.994.Layanan Perkantoran	11,872,197,000															
				002.A Pemeliharaan Alat Pengolah Data	256,000	1	Unit													1
				002.D Perawatan Kendaraan Roda 4/6	99,891,000	3	Unit													1
				002.E Perawatan Kendaraan Roda 2/3	4,050,000	9	Unit													1
				002.F Langganan Daya Dan Jasa	773,524,000	1	Layanan													1
				002.G Jasa Pos / Giro	1,400,000	1	Layanan													1
				002.H Operasional Perkantoran dan Pimpinan	115,200,000	1	Layanan													1
	002.J Operasional Perkantoran	56,840,000	1	Layanan													1			
	16	Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	TIDAK ADA DUKUNGAN ANGGARAN																
						1	Kegiatan											1		
	17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	TIDAK ADA DUKUNGAN ANGGARAN																
						1	Kegiatan											1		
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2338.BGA.002. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	389,093,000.00															
054.C. Forum Konsultasi Publik dan review Standart Pelayanan Pelabuhan Perikanan				5,025,000.00	1	Kegiatan								1						
				12,440,950,000																

Trenggalek, 14 Januari 2026
Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Iman, S.St.Pi, M.Si.
NIP 198303152009011002